

ABSTRAK

Hak atas lingkungan hidup telah diakui sebagai bagian dari HAM dalam beberapa peraturan nasional dan internasional, oleh karena itu, negara melalui pemerintah diwajibkan untuk melindungi, menghormati, memenuhi, memajukan dan menegakkan terhadapnya.

Penulisan hukum ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis lebih lanjut pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Badas merupakan pelanggaran HAM serta kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak atas lingkungan hidup dari pencemaran yang terjadi.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan berbasis pada data primer dan sekunder.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencemaran yang terjadi di Desa Badas disebabkan oleh bercampurnya zat kimia dari kebocoran air limbah PT Mahatex dengan limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan guna menanggulangi limbah yang bocor dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kelestarian lingkungan hidup dan penggunaan pestisida. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap air sungai guna mencegah pencemaran meluas dan pemantauan aktivitas terhadap PT Mahatex agar tidak terjadi kelalaian terhadap pengelolaan limbah. Tindakan Pemerintah Kabupaten Kediri masih bersifat insidental karena belum adanya landasan kebijakan terkait dengan hal tersebut sehingga kewajiban negara belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selaku pemangku kewajiban.

Rekomendasi yang disampaikan adalah diperlukannya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang lingkungan hidup guna menjamin hak atas lingkungan hidup masyarakat dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud kewajiban tiap orang maupun badan hukum.

Kata Kunci : Kewajiban Negara, Hak Atas Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The right of the environment has been recognized as part of human rights in several national and international regulations, therefore, the state through the government is obliged to protect, respect, fulfill, promote and enforce it.

The legal writing aims to describe and analyze further about environmental pollution that occurred in Badas Village as a violation of human rights as well as the obligation and responsibility of the state to make efforts to prevent toward right of environment from pollution that occurs.

The writing of this paper uses a socio-legal research approach with analytical descriptive research specifications and based on primary and secondary data.

This study concluded that the pollution that occurred in Badas Village was caused by a mixture of chemicals from PT Mahatex's wastewater leak with household waste and agricultural waste. Regarding this, the Kediri Regency Government has mediated between the community and the company to deal with leaky waste and provide socialization to the community regarding environmental sustainability and the use of pesticides. Regency Government also supervises river water to prevent widespread pollution and monitoring activities against PT Mahatex so there is no negligence on waste management. The actions of the Regency Government of Kediri are still incidental because there is no policy foundation related to this, so that the state's obligations have not been fully implemented by the Regency Government of Kediri as the obligation holder.

The recommendations that can be submitted are the need for regional regulations that regulate the environment in order to guarantee the rights of environment for the community and awareness of the importance of preserving the environment as a manifestation of the obligations of every person and legal entity.

Keywords : State Obligations, Environmental Rights.